

Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Pembiayaan Pembangunan Pertanian di Provinsi Jambi

Erfit

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

e-mail korespondensi: erfitibrahim@yahoo.com

Abstract.

This study aims to describe the distribution of corporate social responsibility (CSR) partnership funds by various companies in Jambi Province, both State-Owned Enterprises (BUMN) and Private Owned Enterprises (BUMS). This study is a collective case study (survey and case study). The results of this study indicate the large potential of CSR partnership fund for Jambi Province. Based on CSR partnership fund distribution can generally be divided into two forms: Partnership and Community Development Program (PKBL). The partnership program includes the provision of revolving fund credit with low interest to UMKM with various business fields in Jambi province. Development of CSR fund disbursement is more directed to community empowerment efforts. The various forms of Community Development cover the areas of education with the provision of scholarships, health, construction of public facilities, natural disaster relief and environmental conservation. Furthermore, although the potential of CSR funds for Jambi Province is quite large, it has not been able to encourage the development of the agricultural sector in Jambi Province. This is evident from the relatively small amount of CSR partnership program funds channeled for the development of the agricultural sector.

Keywords: Corporate Social Responsibility, financing development, agricultural development

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyaluran dana kemitraan corporate social responsibility (CSR) oleh berbagai perusahaan yang ada di Provinsi Jambi baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus kolektif (survei dan studi kasus). Hasil penelitian menunjukkan cukup besarnya potensi dana kemitraan CSR untuk Provinsi Jambi. Berdasarkan penyaluran dana kemitraan CSR secara umum dapat dibedakan dalam 2 bentuk yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program kemitraan meliputi pemberian kredit dana bergulir dengan bunga rendah kepada UMKM dengan berbagai bidang usaha yang ada di Provinsi Jambi. Bina Lingkungan penyaluran dana CSR lebih banyak diarahkan kepada upaya pemberdayaan masyarakat. Berbagai bentuk Bina Lingkungan tersebut meliputi bidang pendidikan dengan pemberian bidang bea siswa, bidang kesehatan, pembangunan fasilitas umum, bantuan bencana alam dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, meskipun potensi dana CSR bagi Provinsi Jambi cukup besar ternyata belum banyak dapat mendorong pembangunan sektor pertanian di Provinsi Jambi. Hal ini terlihat dari relatif kecilnya dana program kemitraan CSR yang disalurkan untuk pengembangan sektor pertanian.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility, pembiayaan pembangunan, pembangunan pertanian

PENDAHULUAN

Bagi Provinsi Jambi pembangunan sektor pertanian masih merupakan sektor yang penting dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah. Hal ini dapat dilihat dari masih besarnya sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja bagi perekonomian wilayah Provinsi Jambi. Sektor pertanian telah menyumbang sekitar 27,5 persen terhadap PDRB Provinsi Jambi dan juga telah dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar yaitu sekitar 46,88 persen dari angkatan kerja yang ada (Jambi Dalam Angka, 2009). Melihat peranan dari sektor pertanian terhadap perekonomian dan potensi yang dimiliki disektor pertanian ini, maka upaya pembangunan pertanian masih perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Melihat strategisnya pembangunan pertanian bagi Provinsi Jambi, maka pembangunan pertanian termasuk dalam hal pembiayaannya tidak saja menjadi tanggung jawab departemen teknis semata tetapi juga menjadi tanggung jawab pihak lainnya diantaranya pihak perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jambi baik swasta maupun pemerintah. Partisipasi pihak perusahaan tersebut salah satu diantaranya melalui dana *corporate social responsibility* (CSR) yang dikeluarkan pihak perusahaan untuk membantu masyarakat dalam bentuk kemitraan yang dikenal dengan kemitraan dana CSR. Secara umum CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan/ lembaga profit terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi kegiatannya (Iqbal dan Sudaryanto, 2008). Dengan penyaluran dana CSR dari pihak perusahaan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan dari sektor pertanian yang pada gilirannya nanti akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani pada umumnya. Penelitian tentang penyaluran dana CSR cukup banyak dilakukan tetapi masih bersifat umum dan hasil yang diperoleh juga belum lagi bersifat menyeluruh, sehingga belum dapat diperoleh gambaran bagaimana penyaluran dana CSR yang disalurkan selama ini khususnya untuk sektor pertanian khususnya untuk Provinsi Jambi (Badaruddin, 2008, Zaleha, 2008 dan Masduki *et al*, 2009). Berdasarkan hal tersebut penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan dana CSR untuk pembiayaan pembangunan khususnya bidang pertanian sangat perlu untuk dilakukan.

METODE

Penelitian ini merupakan gabungan antara survei dan studi kasus. Dalam penelitian ini dipilih beberapa kasus penyaluran dana CSR yang dijalankan oleh pihak perusahaan di Provinsi Jambi yang ditentukan secara sengaja (*purposive*). Dengan demikian dari beberapa kasus penyaluran dana CSR yang dijalankan akan dapat diperoleh deskripsi yang lebih jelas bagaimana penyaluran dana CSR dan fenomenanya serta berbagai persoalan yang ada secara mendalam dan menyeluruh khususnya untuk bidang pertanian.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi meliputi kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi, dengan mengambil beberapa kasus penyaluran dana CSR yang dijalankan oleh beberapa perusahaan diantaranya: PT Telkom, BNI 46, Bank Jambi dan PT Wirakarya Sakti (WKS). Kasus dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan lokasi dan keragaman usaha (BUMN/BUMS) sehingga akan dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh berkaitan dengan implementasi penyaluran dana CSR di Provinsi Jambi khususnya untuk sektor pertanian.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa metode yaitu dengan wawancara terstruktur dengan kuesioner yang disiapkan sebelumnya dan melalui wawancara tidak

terstruktur/mendalam (*in dept interview*) dengan beberapa informan kunci sehingga diperoleh informasi yang lebih akurat, menyeluruh dan mendalam.

Dalam penelitian ini pada dasarnya digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola-pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga akan diperoleh tema dan kesimpulan (Strauss, A dan Corbin, J 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penyaluran Dana CSR di Provinsi Jambi

Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2010 – 2015 dijelaskan visi dari pembangunan Provinsi Jambi adalah Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera (JAMBI EMAS). Kemudian berdasarkan visi tersebut ditetapkan misi dari pembangunan Provinsi Jambi yang meliputi: 1) meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum, 2) meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan budaya, 3) meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri, 4) meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan dan 5) meningkatkan tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta kesetaraan gender. Untuk mencapai berbagai hal tersebut pemerintah daerah melaksanakan berbagai upaya dan mengerah segenap potensi yang ada untuk mencapai visi JAMBI EMAS tersebut. Salah satu sumbernya adalah dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Secara umum CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan/ lembaga profit terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi kegiatannya (Iqbal dan Sudaryanto, 2008). Muncul program tidak terlepas dari pandangan bahwasanya pembangunan termasuk pembangunan daerah tidak saja merupakan tanggung jawab pemerintah saja tetapi tanggung jawab semua pihak termasuk didalamnya pihak perusahaan baik BUMN maupun perusahaan swasta. Disamping itu adanya program CSR ini berangkat dari adanya kewajiban dari BUMN untuk menyisihkan sebahagian laba untuk pemberdayaan masyarakat lewat Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) sesuai dengan keputusan menteri BUMN nomor 236 tahun 2003. Dalam perkembangannya keharusan untuk melaksanakan CSR ini bagi perusahaan diperluas tidak saja diwajibkan kepada BUMN tetapi juga kepada perusahaan milik swasta (BUMS) sesuai dengan undang- UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seperti yang tercantum dalam pasal 74 adanya tanggung jawab sosial bagi pihak perusahaan. Diwajibkannya perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya melalui penyaluran dana CSR mengingat adanya pemanfaatan sumberdaya alam oleh pihak perusahaan bahkan bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial tersebut dapat dikenakan sanksi. Bahkan bagi BUMN seperti yang dinyatakan dalam peraturan menteri Negara BUMN nomor 5 tahun 2007 menjelaskan bahwa kewajiban menyalurkan dana CSR bagi BUMN dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kesehatan perusahaan dan secara tegas disebutkan besar dana CSR yang harus disalurkan kepada masyarakat adalah maksimum sebesar 2 persen untuk program kemitraan dan 2 persen untuk bina lingkungan dari laba bersih yang diterima oleh perusahaan.

Bagi Provinsi Jambi potensi dana CSR cukup besar hal ini disebabkan cukup banyak perusahaan yang menjalankan usahanya di Provinsi Jambi dalam berbagai sektor baik yang berkantor di Jambi ataupun merupakan cabang perusahaan baik itu BUMN maupun perusahaan swasta. Dari data yang ada potensi dana CSR yang

diharapkan dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jambi baik BUMN maupun perusahaan swasta diperkirakan bisa mencapai angka Rp. 428 milyar (Bappeda, 2013) Jumlah ini tentu diharapkan akan menjadi lebih besar dimasa yang akan datang mengingat makin tumbuh dan berkembangnya dunia usaha di Provinsi Jambi. Sesuai dengan penamaannya maka penyaluran dana CSR yang implementasinya adalah dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) , maka penyalur dana CSR tersebut dapat dibedakan antara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program kemitraan lebih banyak diarahkan untuk mendorong perkembangan usaha-usaha produktif yang ada pada masyarakat terutama untuk UMKM kegiatan ini bisa dalam bentuk pemberian pinjaman dengan bunga rendah kepada pihak UMKM diikuti dengan pemberian pelatihan dan pendampingan terhadap UMKM. Sementara Bina Lingkungan lebih banyak diarahkan kepada pemberian bantuan kepada masyarakat terutama yang berada disekitar lokasi perusahaan yang sering diistilahkan dengan Ring I yang mengarah ke pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang misalnya dalam bidang pendidikan dengan memberikan bea siswa kepada anak-anak usia sekolah yang tinggal disekitar lokasi perusahaan, bidang kesehatan, perbaikan lingkungan, pembangunan infrastruktur desa dan lain-lain. Secara ringkas berbagai bentuk kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan dalam penyaluran dana CSR dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Penyaluran Dana CSR pada Perusahaan di Provinsi Jambi

No	Program	Bidang Kegiatan
1.	Program Kemitraan	Bantuan modal/pinjaman Pelatihan Pembinaan Pendidikan
2.	Bina Lingkungan	Kesehatan Infrastruktur desa Lingkungan hidup Bantuan bencana alam

Penyaluran Dana CSR pada PT Telkom

Dilihat dari usahanya PT Telkom merupakan perusahaan yang bergerak dibidang informasi, telekomunikasi dan penyedia jasa telekomunikasi yang terbesar di Indonesia. Salah satu wilayah usahanya adalah Provinsi Jambi. Sebagai usaha milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan, maka PT Telkom menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan melalui program CSR nya yang diimplementasikan dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Disamping itu pelaksanaan CSR ini didasarkan kepada UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seperti yang tercantum dalam pasal 74 adanya tanggung jawab sosial bagi pihak perusahaan. Mengingat pentingnya program CSR bagi pihak PT Telkom maka ditetapkan visi dan misi dari program CSR sebagai berikut: Visi CSR PT Telkom, untuk menjadi pelopor dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di Asia. Sedang misi CSR PT Telkom adalah: 1) mengambil peran aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas melalui pendidikan teknologi infokom, 2) mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dalam kehidupan masyarakat dan 3) mengambil peran aktif dalam memelihara keseimbangan alam.

Dalam pelaksanaan PKBL ini PT Telkom mengklasifikasikan kegiatannya dalam 7 kelompok yang meliputi: a) pendidikan, merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan baik skill, knowledge dan attitude masyarakat, b) kesehatan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, c) kebudayaan dan keadaban, merupakan kegiatan kepedulian untuk melestarikan dan membina budaya, seni, olah raga, agama dan kegiatan masyarakat lainnya dalam upaya mendukung perusahaan mengimplementasikan nilai-nilai good corporate citizenship, d) kemitraan adalah kegiatan mempererat jalinan kemitraan dengan pihak ketiga baik di bidang produk maupun lainnya yang related maupun yang nonrelated dengan core bisnis PT Telkom dan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak, e) layanan umum adalah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang sarana dan prasarana telekomunikasi, f) lingkungan adalah kepedulian untuk meningkatkan kualitas lingkungan internal maupun eksternal perusahaan agar terjadi hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungannya dan g) bantuan kemanusiaan dan bencana alam adalah kegiatan untuk memberikan bantuan didalam penanggulangan bencana alam dan bencana kemanusiaan. Berikut diuraikan pelaksanaan program kemitraan dan PKBL pada PT Telkom.

Program Kemitraan

Program kemitraan ini dijalankan dalam bentuk memberikan bantuan pinjaman dana kepada UMKM baik untuk investasi maupun untuk modal kerja untuk berbagai usaha produktif dan untuk berbagai sektor dengan tingkat bunga 6 persen pertahun. Besarnya tingkat bunga pinjaman ini jelas lebih rendah dari tingkat bunga pinjaman secara umum yang mencapai 8 sampai 12 persen. Disamping bantuan pinjaman dana, pihak PT Telkom juga memberikan pembinaan dan pelatihan kepada usaha binaannya yang disebut sebagai mitra binaan. Dalam hal ini pihak PT Telkom memberikan syarat kepada usaha kecil yang dapat diberikan pinjaman dana sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar.
- Milik Warga Negara Indonesia.
- Berdiri sendiri bukan anak atau cabang perusahaan.
- Berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau berbadan hukum termasuk koperasi.
- Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun dan mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan.

Program kemitraan dalam bentuk bantuan pinjaman lunak kepada UMKM telah disalurkan oleh PT Telkom cabang Jambi untuk berbagai bidang usaha yang meliputi bidang perdagangan, industri, pertanian (peternakan, perkebunan, dan perikanan), dan sektor jasa. Berikut ini dapat dilihat perkembangan penyaluran dana program kemitraan CSR untuk berbagai bidang usaha di Provinsi Jambi.

Tabel 2. Perkembangan Penyaluran Dana CSR PT Telkom Cabang Jambi untuk Program Kemitraan (Rp)

No	Bidang Usaha	2011	2012	2013
1.	Pertanian	1.264.000.000	1.289.500.000	436.200.000
2.	Industri	2.066.000.000	1.289.500.000	343.200.000
3.	Perdagangan	3.747.000.000	4.245.100.000	1.447.600.000
4.	Jasa	1.714.500.000	1.944.100.000	387.000.000
	Jumlah	8.791.500.000	8.768.200.000	2.614.000.000

Sumber: PT Telkom Wilayah Jambi

Dari Tabel 2 terlihat besarnya dana CSR PT Telkom wilayah Provinsi Jambi yang disalurkan untuk sektor pertanian adalah relatif kecil dibandingkan sektor lainnya bahkan jumlahnya sangat jauh menurun pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya. Dari data yang ada hanya sekitar 14 - 16 persen dana CSR untuk program kemitraan yang disalurkan untuk sektor pertanian. Dengan demikian dari data tersebut terlihat masih relative kecilnya dana CSR PT Telkom untuk program kemitraan yang disalurkan untuk sektor pertanian.

Adapun untuk mendapatkan bantuan dana pinjaman untuk program kemitraan ini pihak PT Telkom menetapkan suatu prosedur sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal permohonan pinjaman yang berisikan data pribadi peminjam sesuai dengan KTP.
2. Data keuangan yang meliputi laporan keuangan/catatan keuangan 3 bulan terakhir.
3. Rencana penggunaan dana pinjaman.
4. Surat izin usaha dan lain-lain (pas foto, denah lokasi usaha, foto copi rekening).

Program Bina Lingkungan

Disamping program kemitraan, penyaluran dana CSR pada PT Telkom juga dilakukan dalam bentuk program bina lingkungan. Merujuk kepada Laporan Tahunan PT Telkom (2013) dijelaskan bahwa program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi social masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana bagian keuntungan perusahaan. Berbeda dengan program kemitraan melalui dalam bentuk penyaluran kredit dengan tingkat bunga rendah, maka program bina lingkungan pada PT Telkom lebih banyak diberikan dalam bentuk penyaluran dana hibah kepada masyarakat yang ada di daerah operasional yang ada di Provinsi Jambi. Adapun objek bantuan yang dapat diberikan bantuan dana Bina Lingkungan dari pihak PT Telkom adalah korban bencana alam, pendidikan dan latihan, kesehatan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah dan pelestarian alam.

Penyaluran Dana CSR pada BNI 46

Secara historis BNI 46 didirikan pada tahun 1946 dan merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang jasa keuangan. Sebagai salah satu Bank milik pemerintah, maka salah satu misi dari BNI 46 adalah meningkatkan kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Berdasarkan kepada misi tersebut maka BNI 46 disamping menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, maka pihak BNI 46 juga merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat melalui program yang disebut sebagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang implementasinya dijalankan dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Adapun pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan ini pada BNI 46 dijalankan oleh Unit *Corporate Community Responsibility* yang secara langsung disupervisi oleh direktur utama dan mengacu kepada peraturan menteri Negara BUMN yang mewajibkan kepada BUMN untuk menyisihkan sebahagian labanya atau maksimum 4 persen dari labanya setelah pajak. Maka pada BNI 46 berdasarkan RUPS ditetapkan proporsinya 1 persen untuk program kemitraan dan 3 persennya untuk program bina lingkungan. Program kemitraan dan bina lingkungan pada BNI 46 ini dalam kegiatan-kegiatannya mengusung tema “ BNI Berbagi “ atau bersama membangun negeri. Dengan adanya kegiatan PKBL ini pihak BNI 46 berharap dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan social masyarakat serta lingkungan yang lebih baik. Berikut ini akan diuraikan jalannya program kemitraan dan bina lingkungan yang ada pada BNI 46.

Program Kemitraan

Kegiatan program kemitraan oleh BNI 46 dilakukan dalam bentuk penyaluran kredit dengan bunga rendah dan pembinaan kepada pengusaha kecil yang dijadikan sebagai mitra. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan pengusaha kecil agar menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Kegiatan kemitraan diarahkan kepada bidang industri kreatif dan mendukung ketahanan pangan melalui program “ Kampoeng BNI “ yaitu suatu program pemberdayaan masyarakat dalam suatu kawasan dengan konsep klaster. Namun demikian dari data yang ada sampai dengan tahun 2012 Kampoeng BNI ini belum ada di Provinsi Jambi (Laporan Tahunan BNI 46, 2012). Dengan demikian penyaluran dana CSR bagi BNI 46 wilayah Jambi masih diarahkan untuk kegiatan Bina Lingkungan. Namun demikian dari data penyaluran dana Program Kemitraan ditingkat pusat BNI 46 memperlihatkan cukup besarnya proporsi dana CSR melalui Program Kemitraan yang disalurkan untuk sektor pertanian. Dari data yang ada sekitar 49, 47 persen. Namun demikian penyaluran dana CSR untuk Program Kemitraan khususnya sektor pertanian belum dapat disalurkan secara merata pada berbagai wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Jambi walaupun BNI 46 juga memiliki kantor cabangnya di Provinsi Jambi. Hal ini sangat umum terjadi pada badan usaha dimana daerah merupakan kantor cabangnya, sementara kebijakan penyaluran dana CSR lebih banyak ditentukan oleh kantor pusatnya di Jakarta. Keadaan ini tentu perlu mendapatkan perhatian baik bagi pihak BNI 46 sendiri maupun bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun kebijakan pengelolaan dana CSR dimasa yang akan datang sehingga apa yang diharapkan dari penyaluran dana CSR dapat tercapai dan lebih tepat sasaran. Berikut dapat dilihat besarnya penyaluran dana oleh BNI 46 kantor pusatnya berkaitan dengan program kemitraan yang dijalankan untuk berbagai bidang usaha.

Tabel 3. Penyaluran Dana Program Kemitraan pada BNI 46 Tahun 2012

No	Sektor Ekonomi	Jumlah (Rp)
1.	Pertanian	18.671.916.663
2.	Perdagangan	16.363.437.786
3.	Jasa	1.299.500.000
4.	Industri	941.500.000
5.	Pengangkutan dan pergudangan	100.000.000
6.	Pertambangan	30.000.000
7.	Konstruksi	20.000.000
8.	Lainnya	316.000.000
Jumlah		37.742.354.449

Sumber: Laporan Tahunan BNI 46 (2012)

Program Bina Lingkungan

Sebagai salah satu BUMN yang usahanya juga mencakup wilayah Jambi tentu berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi. Untuk itu selain menjalankan fungsi ekonominya maka pihak BNI 46 juga menjalankan kewajiban sosialnya. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian Bank BNI 46 terhadap masyarakat disekitar lokasi usahanya dengan harapan adanya kepedulian dari masyarakat terhadap pihak BNI 46 sendiri. Program bina lingkungan pada BNI 46 diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan melakukan kegiatan untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan social bagi seluruh masyarakat. Alokasi dana bina lingkungan pada BNI 46 dibedakan dalam 2 kelompok, kelompok pertama: berupa dana BUMN peduli kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh menteri dan kelompok kedua melalui

BUMN Pembina. Alokasi dana BUMN Pembina meliputi 6 bidang antara lain: bantuan bencana alam, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, sarana dan prasarana ibadah, serta pelestarian lingkungan.

Penyaluran Dana CSR pada Bank Jambi

Bank Jambi adalah Bank milik pemerintah daerah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi. Sebagai bank daerah yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah maka cabang-cabang Bank Jambi tersebar diberbagai daerah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi. Sebagai sebuah BUMD yang bergerak dibidang jasa keuangan maka Bank Jambi menjalankan semua usaha yang ada pada Bank umum, dan sebagai Bank daerah Bank Jambi juga berfungsi sebagai pemegang kas daerah yang berfungsi melaksanakan dan mengelola penyimpanan, penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta mengutamakan pembiayaan bidang proyek pembangunan daerah. Sebagai sebuah bank daerah Bank Jambi diharapkan dapat mendorong perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah sumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Adapun visi dari pada Bank Jambi adalah menjadi Bank yang ideal dan sehat dalam mengujudkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dibidang jasa bank yang memiliki nilai tambah bagi ekonomi daerah khususnya UKM dengan pengelolaan secara professional, kehati-hatian dan berkembang secara wajar. Kemudian misi dari Bank Jambi adalah: 1) menjalankan usaha sebagai Bank Umum sebagai konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, 2) penggerak, pendorong, laju perekonomian dan pembangunan daerah, 2) pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah dan 3) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Sebagai mana yang berlaku pada sebuah BUMN, maka Bank Jambi sebagai sebuah BUMD juga diwajibkan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya atau CSR nya. Adapun penyaluran dana CSR bagi Bank Jambi bertujuan untuk: 1) mendorong kesejahteraan masyarakat Jambi dan perbaikan lingkungan, 2) membantu pelaksanaan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab, 3) memberikan kontribusi positif bagi masyarakat daerah Jambi dan lingkungan sekitar daerah Jambi, 4) membangun simpati masyarakat kepada Bank Jambi yang dapat menunjang terbentuknya citra positif Bank Jambi dimata masyarakat, 5) meningkatkan nilai Bank Jambi melalui reputasi yang baik, 6) meningkatkan pemahaman publik terhadap Bank Jambi melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam mencapai tujuan CSR tersebut maka Bank Jambi telah menjalankan berbagai kegiatan sebagai implementasi dari kegiatan CSR tersebut antara lain: (Laporan Tahunan Bank Jambi, 2013)

- a. Bidang pendidikan, dalam hal ini pemberian beasiswa untuk anak-anak kurang mampu dan berprestasi ditingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Jambi.
- b. Bidang kesehatan, dalam hal ini dengan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui pengobatan gratis untuk penyakit malaria, katarak, kusta, lepra dan penyakit lainnya, bantuan pemberantasan nyamuk demam berdarah yang bekerjasama dengan dinas kesehatan.
- c. Bidang ekonomi, dengan memberikan bantuan modal kepada UKM yang ada di kota Jambi misalnya bantuan modal kepada pengrajin tempe, batu batuan pengrajin tahu.
- d. Bidang sosial, berupa bantuan kepada program bedah rumah dalam rangka mendorong visi dari pada pembangunan Provinsi Jambi yaitu JAMBI EMAS pada tahun 2015.

Tabel 4. Penyaluran Dana CSR pada Bank Jambi

No	Tahun	Jumlah (dalam jutaan)
1.	2011	1.656
2.	2012	1.266
3.	2013	1.075

Sumber: Bank Jambi

Dari data di atas terlihat adanya kecenderungan makin menurunnya jumlah dana CSR PT Bank Jambi dari tahun ketahun. Disamping itu juga terlihat bahwasanya dana CSR PT Bank Jambi lebih banyak disalurkan untuk usaha-usaha pemberdayaan masyarakat misalnya untuk kegiatan pendidikan melalui pemberian bea siswa atau bidang kesehatan. Sementara untuk kegiatan ekonomi atau usaha-usaha produktif jumlahnya masih sedikit. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam pengelolaan dana CSR dimasa yang akan datang, sehingga apa yang diharapkan dari penyaluran dana CSR dapat tercapai.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/CSR pada PT WKS

PT Wirakarya Sakti (WKS) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) yang ada di Provinsi Jambi yang daerah kerja meliputi 5 kabupaten yaitu kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi dan kabupaten Tebo. Hasil dari HTI ini nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk menghasilkan bubur keras (pulp) dan kertas oleh perusahaan lain yang masih merupakan satu grup dengan PT WKS yang juga berlokasi di Provinsi Jambi.

Sebagai sebuah perusahaan yang mengelola sumber daya hutan yang merupakan suatu perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam maka menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas PT WKS diwajibkan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya melalui program CSR terutama bagi masyarakat disekitar lokasi operasional perusahaan. Selain itu melihat bidang usaha dari PT WKS berkaitan dengan pengelolaan hutan dalam bentuk HTI, maka pelaksanaan program CSR ini juga dipertegas dengan adanya surat keputusan menteri kehutanan nomor 177 tahun 2003 tentang pengelolaan hutan tanaman lestari (PHTL). Bagi sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan hutan seperti PT WKS ini pelaksanaan program CSR ini menjadi sangat penting mengingat besarnya potensi konflik social dengan masyarakat disekitar lokasi operasi perusahaan. Dengan adanya program CSR ini dapat tercipta harmonisasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Selain itu program CSR bagi perusahaan pengelolaan hutan seperti halnya PT WKS ini sering dikaitkan dengan isu-isu global, lingkungan dan hak azazi manusia (HAM). Berbeda halnya dengan beberapa perusahaan lainnya pelaksanaan program CSR ini pada PT WKS diimplementasikanya dalam bentuk program Community Development (CD) dalam berbagai kegiatan baik berkaitan dengan pemberdaaan masyarakat maupun yang berkaitan dengan lingkungan. Secara garis besar kegiatan CD yang dijalankan oleh pihak PT WKS dapat dibedakan dalam 3 kelompok yang meliputi: kegiatan sosial, proyek fisik dan kegiatan ekonomi (Laporan Tahunan PT WKS). Secara rinci berbagai kegiatan CD pada PT WKS ini berdasarkan 3 kelompok diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Bentuk Program Community Development (CD) dalam Penyaluran Dana CSR pada PT WKS

No	Program	Bidang Kegiatan
1.	Program Ekonomi	Kewirausahaan Koperasi Tambak Pternakan Pembibitan
2.	Program Fisik	Sekolah Tempat ibadah Jalan Pasar
3.	Program Sosial	Pendidikan Kesehatan Pemuda Lingkungan hidup Keagamaan

Sumber: PT WKS

Selain berbagai program di atas juga dikembangkan pola kemitraan dengan masyarakat sebagai salah satu bentuk penyelesaian permasalahan lahan yang terjadi dengan masyarakat sekitar lokasi operasi perusahaan. Ada pun pola kemitraan yang dijalankan sekarang ini disebut dengan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK). Kegiatan dari HTPK ini meliputi pengadaan bibit, penyiraman jalan sepanjang pemukiman, kontraktor tebangan, penanaman, pengadaan tenaga kerja, pemanfaatan hasil hutan nonkayu seperti rotan, madu dan lain-lain. Berikut ini dapat dilihat distribusi penyaluran dana CSR PT WKS untuk berbagai bidang kegiatan.

Tabel 6. Penyaluran Dana CSR PT WKS Jambi Tahun 2012

No	Bidang/Setor	Jumlah
1.	Pertanian	82.542.000
2.	Peternakan	180.000.000
3.	Perikanan	9.800.000
4.	Wira Usaha	781.634.355
5.	Infrastruktur Ekonomi	1.125.354.506
6.	Infrastruktur Keagamaan	214.180.000
7.	Infrastruktur Sosial	486.753.748
8.	Pendidikan	270.061.103
9.	Dan lain-lain	785.539.514
	Jumlah	3.935.865.226

Sumber: PT. WKS Jambi

Dari data di atas memperlihatkan masih relatif kecilnya proporsi dana CSR PT WKS Jambi yang disalurkan untuk sektor pertanian. Dari data yang ada hanya sekitar 7 persen saja dari dana CSR PT WKS yang ada yang disalurkan untuk sektor pertanian. Dengan kata lain sebahagian besar dana CSR PT WKS disalurkan hanya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat atau program bina lingkungan (PBL).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Provinsi Jambi memiliki potensi yang cukup besar terhadap dana CSR, hal ini mengingat cukup banyaknya perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jambi baik BUMN maupun BUMS. Dilihat dari penyaluran dana kemitraan CSR secara umum dapat dibedakan dalam 2 bentuk yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sehingga dalam penerapannya penyaluran dana kemitraan CSR sering disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan meliputi pemberian kredit dana bergulir dengan bunga rendah kepada UMKM dengan berbagai bidang usaha yang ada di Provinsi Jambi. Sementara Bina Lingkungan penyaluran dana CSR lebih banyak diarahkan kepada upaya pemberdayaan masyarakat. Berbagai bentuk Bina Lingkungan tersebut meliputi bidang pendidikan dengan pemberian bidang bea siswa, bidang kesehatan, pembangunan fasilitas umum, bantuan bencana alam dan pelestarian lingkungan. Di sisi lain, meskipun potensi dana CSR bagi Provinsi Jambi cukup besar ternyata belum banyak diarahkan untuk pembiayaan pembangunan pertanian di Provinsi Jambi. Hal ini dapat dilihat dari masih relatif kecilnya penyaluran dana CSR yang disalurkan untuk usaha-usaha pertanian di Provinsi Jambi.

Saran

Dalam rangka meningkatkan pembangunan sektor pertanian di Provinsi Jambi maka disarankan agar pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan mekanisme yang tepat dalam mengarahkan potensi dana CSR yang ada pembiayaan usaha-usaha pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. (2007). *Perekonomian Indonesia (Dalam Perspektif Makro)*. Penerbit Biografika Bogor.
- Alfitri. (2010). *Program community development perusahaan migas dalam penguatan modal sosial*. Disertasi. Program Pascasarjana Unpad. Bandung.
- Ariadi. (2008). *Penyusunan model pengelolaan dana CSR (corporate social responsibility) BUMN bagi upaya pengembangan dan pembedayaan usaha kecil dan menengah (UKM)*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Badaruddin. (2008). *Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat melalui pemanfaatan potensi modal sosial*. Pidato pengukuhan guru besar tetap sosiologi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Bappeda. *Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2009*. Jambi.
- Bappeda. (2013). *Rencana Aksi Daerah Pemanfaatan Dana CSR Provinsi Jambi*. Bappeda. Provinsi Jambi.
- Brata, S. (2003). *Metodologi penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Endraswana, S. 2003. *Metodologi penelitian kebudayaan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Erfit. (1992). *Studi tentang keberhasilan petani kelapa sawit peserta PIR Ophir di kabupaten Pasaman Sumatera Barat*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas. Padang.
- Erfit. (2004). *Analisis keberhasilan ekonomi dan distribusi pendapatan petani peserta PIR setelah masa konversi (Studi Kasus PIR-SUS II kelapa sawit Sungai Bahar*

- kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Manajemen dan Pembangunan* Vol 3 No 1 Universitas Jambi. Jambi.
- Erfit, Asdi A, Elfindri dan Rudi F. (2009). Modal sosial dan pengaruhnya terhadap efektifitas kemitraan usaha pada agribisnis hortikultura. *Jurnal Ilmu-ilmu sosial Sigmasos*. Lembaga Penelitian Univ. Bung Hatta. Padang.
- Erfit dan Yulmardi. (2009). Rekonstruksi model kemitraan pada agribisnis hortikultura dalam upaya pengembangan wilayah sentra hortikultura (Tahun I. Studi tentang kemitraan pada agribisnis hortikultura studi kasus pada beberapa wilayah sentra hortikultura di Sumatera. Jambi.
- Erfit dan Yulmardi. (2010). Rekonstruksi model kemitraan pada agribisnis hortikultura dalam upaya pengembangan wilayah sentra hortikultura: Studi kasus pada beberapa wilayah sentra hortikultura di Sumatera (Tahun II). Jambi.
- Erfit. (2010). Pengembangan pola kemitraan pada agribisnis hortikultura. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Andalas. Padang.
- Erfit, Asdi A, Elfindri dan Rudi F. (2010). Analisis terhadap efektifitas kemitraan usaha pada agribisnis hortikultura. *Jurnal Embrio*. Fak. Pertanian Unitas. Padang.
- Iqbal dan Sudaryanto. (2008). Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dalam perspektif kebijakan pembangunan pertanian. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* volume 6 no. 2, Juni 2008. Pusat Studi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Junaidi, J., Amir, A., & Hardiani, H. (2014). Potensi Klaster Agroindustri Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(1), 9-20.
- Masduki et al. (2008). Program CSR perusahaan migas: Kasus Sumatera Bagian Selatan. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- PT. Telkom. (2013). Laporan Tahunan PT. Telkom Tahun 2013. Jakarta.
- Strauss, A dan Corbin, J. (2005). Dasar-dasar penelitian kualitatif. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Zaleha. (2008). Peranan corporate social responsibility (CSR) PT Inalum divisi PLTA Siguragura terhadap pengembangan sosio ekonomi masyarakat kecamatan Pintu Pohan Meranti kabupaten Toba Samosir. Tesis. Sekolah Pascasarjana USU. Medan.